



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **70.61/PUU/PAN.MK/SP/06/2024**

27 Juni 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024

**Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6  
Jakarta 10270

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "*Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada: a. DPR; b. Presiden; c. DPD; d. MPR; dan e. Mahkamah Agung.*

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI salinan permohonan Nomor 61/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 10:30 WIB.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI diucapkan terima kasih.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

**Tembusan :**

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
3. Yth. Sekretaris Jenderal MPR





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 70.61/PUU/PAN.MK/BASP/06/2024**

Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 10:17 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Ricky Nafri Habibanda**

